

PERAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Siti Alifa Fentiani¹, Yani Achdiani², Gina Indah Permata Nastia³

alifaafentianii2011@gmail.com, yaniachdiani@upi.edu, gina.nastia@upi.edu

¹⁻³ Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, sumber daya finansial, kompetensi pelaksana, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi. Studi literatur menunjukkan bahwa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan di Indonesia memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan seperti tumpang tindih program, keterbatasan anggaran, serta pemerataan layanan di daerah terpencil tetap menjadi kendala. Rekomendasi utama meliputi pembangunan sistem data terintegrasi, peningkatan anggaran, kolaborasi multistakeholder, dan kebijakan berbasis bukti yang disesuaikan dengan konteks sosial-budaya lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial, menciptakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan relevan. Analisis data melibatkan identifikasi pola dan hubungan antar-konsep, guna memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada akses layanan kesehatan, pendidikan, stabilitas ekonomi, dan lingkungan sosial. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara indikator kesejahteraan sosial dengan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat, baik individu maupun kolektif, serta mengeksplorasi tantangan dalam implementasi kebijakan.

KATA KUNCI: Kesejahteraan sosial, Kebijakan, Kualitas hidup, Sumber daya manusia.

ABSTRACT

This research shows that the effectiveness of social welfare policies is influenced by regulatory clarity, financial resources, implementing competencies, community participation, and the use of technology. The literature study shows that programs such as the Family Hope Program (PKH) and BPJS Kesehatan in Indonesia have a positive impact on improving people's quality of life. However, challenges such as overlapping programs, budget limitations, and equitable distribution of services in remote areas remain an obstacle. Key recommendations include building an integrated data system, increasing budgets, multi-stakeholder collaboration, and evidence-based policies tailored to the local socio-cultural context. These measures are expected to improve the effectiveness of social welfare policies, creating significant changes in the quality of life of the Indonesian people. The method used is library research with a descriptive-analytical approach. Data was collected from various academic sources, such as books, scientific journals and relevant reports. Data analysis involved identifying patterns and relationships between concepts, in order to provide an in-depth understanding of the problem under study. This study aims to analyze the role of social welfare in improving people's quality of life, with a focus on access to health services, education, economic stability and the social environment. The study aims to identify the relationship between social welfare indicators and their impact on people's quality of life, both individually and collectively, and explore challenges in policy implementation.

Translated with DeepL.com (free version)

KEY WORDS: Neglected Children, Orphanage, Welfare, Social.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan harapan dan tujuan dari setiap manusia sebagai individu dan masyarakat, bahkan menjadi tujuan dari setiap negara. Kesejahteraan menjadi tujuan dan alat ukur kesuksesan sebuah pemerintahan dalam menjalankan negaranya. Setiap rezim kesejahteraan memiliki penekanan yang berbeda pada tiap alasannya. Satu rezim bisa saja lebih menekankan pengurangan kemiskinan, sedangkan yang lain lebih pada upaya mempromosikan integrasi sosial (Huraerah, 2019).

Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Tujuan utama dibentuknya suatu negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa cara, metode, aturan, alat, pendekatan serta kebijakan dipilih oleh negara dalam rangka pemenuhan tujuan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan kesejahteraan masyarakatnya sebagai tujuan utama dari negara. Rumusan kesejahteraan juga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Yasir, 2009). Namun pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah mengenai kesejahteraan, di mana negara yang seharusnya memberi kontribusi mensejahterahkan rakyatnya masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi sosial muncul di kehidupan masyarakat. Masyarakat kadang tidak merasakan kehadiran pemerintah di beberapa sisi kehidupannya (Tamimah, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajiannya mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional yang didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai).

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang berorientasi pada pemberdayaan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Menurut Pincus dan Minahan (1973), pekerjaan sosial berakar pada pendekatan sistem, yang berarti profesi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang interaksi antara individu dan lingkungan sosial mereka. Payne (2005) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial mencakup tiga kerangka utama: pengetahuan (*body of knowledge*) yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya, keahlian (*body of skills*) yang mencakup kemampuan praktis seperti konseling, advokasi, dan intervensi krisis, serta nilai-nilai (*body of values*) seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan non-diskriminasi.

Lebih lanjut, Healy (2014) menekankan pentingnya pekerjaan sosial sebagai praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah dan evaluasi sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat Zastrow dan Kirst-Ashman (2010) yang menyatakan bahwa pekerja sosial harus

memiliki landasan teoretis yang kuat untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan strategi intervensi yang efektif. Ketiga kerangka ini saling mendukung dan menjadi dasar profesionalisme dalam pekerjaan sosial, memastikan bahwa tindakan pekerja sosial tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi pada keilmuan dan prinsip etis yang teruji.

Pekerjaan sosial juga diatur oleh kode etik yang mengarahkan profesional untuk bekerja secara responsif terhadap kebutuhan klien sambil menghormati keragaman budaya, agama, dan latar belakang mereka, sebagaimana dijelaskan oleh NASW (2008). Dengan demikian, pekerjaan sosial menjadi profesi multidimensi yang bertujuan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah konsep yang mencakup upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial serta layanan dasar bagi warganya guna mencapai kesejahteraan bersama. Di era modern, di mana globalisasi dan urbanisasi meningkat pesat, isu kesejahteraan sosial menjadi semakin krusial. Peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara (Smith, 2019).

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, serta lingkungan sosial yang mendukung. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kurangnya akses terhadap layanan

kesehatan, serta keterbatasan peluang pendidikan menjadi penghambat utama dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Misalnya, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dapat menurunkan tingkat kematian dini dan meningkatkan harapan hidup. Di sisi lain, pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat menjadi hal yang penting untuk dibahas dan diatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesejahteraan sosial memengaruhi kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada aspek-aspek seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, stabilitas ekonomi, dan lingkungan sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai indikator kesejahteraan sosial dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan kebijakan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki berbagai definisi dari literatur terdahulu yang mengungkapkan pentingnya pengelolaan kehidupan sosial yang baik, baik dari aspek material maupun spiritual. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi kehidupan dan penghidupan sosial yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya. Definisi ini juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan, dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang fokus pada pencegahan dan penyelesaian masalah sosial, serta peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

1. **Teori Kesejahteraan Sosial**

Teori yang relevan dalam konteks kesejahteraan sosial adalah Maslow's Hierarchy of Needs yang mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang menggambarkan piramida kebutuhan.

- **Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs):** Merupakan kebutuhan dasar

manusia seperti makanan, air, udara, tidur, dan tempat tinggal.

Program kesejahteraan sosial sering kali difokuskan pada pemenuhan kebutuhan ini terlebih dahulu, terutama pada situasi darurat.

- **Kebutuhan Keamanan (Safety Needs):** Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia membutuhkan rasa aman dan perlindungan, seperti jaminan kesehatan dan perumahan layak, yang menjadi fokus dari banyak kebijakan kesejahteraan sosial.
- **Kebutuhan Sosial (Social Needs):** Kebutuhan untuk berinteraksi sosial dan membangun hubungan yang saling mencintai dan dicintai. Kebijakan yang mendukung inklusivitas dan memperkuat jaringan sosial menjadi sangat penting.
- **Kebutuhan Harga Diri (Esteem Needs):** Berkaitan dengan rasa dihormati oleh orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Program-program yang berfokus pada pengembangan diri dan pendidikan vokasional dapat membantu memenuhi kebutuhan ini.
- **Aktualisasi Diri (Self-Actualization):** Puncak dari hierarki kebutuhan Maslow, di mana individu mencapai potensi penuh mereka. Kebijakan sosial harus mendukung penciptaan lingkungan yang memungkinkan pengembangan bakat dan kreativitas individu.

2. Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Berbagai Negara

Kebijakan kesejahteraan sosial di berbagai negara memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup warga negara, dan menyediakan perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun prinsip dasar serupa, pendekatan yang diambil oleh tiap negara berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing.

- **Indonesia:** Program kesejahteraan sosial di Indonesia berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program utama meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program pemberdayaan sosial lainnya.
- **Swedia:** Mengadopsi sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif dan inklusif, dengan program seperti jaminan sosial universal, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta cuti orang tua yang panjang.
- **Amerika Serikat:** Sistem kesejahteraan sosial di AS lebih terfragmentasi, dengan program-program seperti SNAP, TANF, Social Security, serta Medicare dan Medicaid yang memberikan bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah dan lanjut usia.
- **Britania Raya:** Program kesejahteraan sosial di Inggris mencakup Universal Credit, NHS, dan pendidikan serta perawatan

anak gratis bagi keluarga berpendapatan rendah.

- **Finlandia:** Memiliki sistem kesejahteraan sosial terbaik dengan jaminan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan cuti orang tua dengan kompensasi finansial.
- **Jepang:** Menggunakan sistem kesejahteraan sosial yang mencakup jaminan kesehatan universal dan tunjangan pensiun, meskipun dengan ketergantungan yang lebih besar pada keluarga dalam dukungan sosial.

3. Dampak Kesejahteraan Sosial

Kebijakan kesejahteraan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dampak-dampak ini bisa dilihat dalam beberapa hal:

- **Dampak terhadap Ekonomi:** Program kesejahteraan sosial dapat meningkatkan pendapatan keluarga berpendapatan rendah dan mengurangi kemiskinan. Bantuan sosial seperti PKH dan Universal Credit telah terbukti meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di kalangan kelompok marginal.
- **Dampak terhadap Pendidikan:** Kebijakan kesejahteraan sosial dapat

meningkatkan akses pendidikan melalui beasiswa pendidikan atau subsidi biaya sekolah, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi. Negara dengan kebijakan kesejahteraan sosial yang inklusif, seperti Swedia dan Finlandia, menunjukkan partisipasi pendidikan yang tinggi di kalangan anak-anak dari keluarga miskin.

- **Dampak terhadap Kesehatan:** Kebijakan kesejahteraan sosial yang mencakup akses ke jaminan

kesehatan universal dapat meningkatkan harapan hidup dan mengurangi angka kematian prematur, terutama di kalangan orang miskin. Sistem kesehatan yang terjangkau membantu dalam pencegahan penyakit dan pengobatan dini, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kebijakan ini mengurangi beban kesehatan ekonomi yang dapat menambah kesulitan hidup masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis, guna memahami dan menganalisis isu tertentu secara mendalam. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai referensi akademik seperti buku, jurnal ilmiah, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Langkah awal penelitian ini dimulai dengan identifikasi topik dan permasalahan. Peneliti merumuskan topik serta permasalahan yang akan dipecahkan melalui pencarian kata kunci yang relevan serta penentuan ruang lingkup penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penelitian tetap terfokus pada tujuan utama dan menghindari informasi yang tidak relevan.

Setelah topik dan permasalahan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis

yang meliputi buku, jurnal ilmiah, literatur terkait, catatan, serta laporan. Buku teks dan referensi lainnya menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi dasar, serta jurnal ilmiah digunakan untuk memperkuat penelitian dengan data empiris yang relevan. Dokumen seperti makalah konferensi, skripsi, tesis, atau disertasi juga ditinjau untuk melengkapi literatur yang ada.

Tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ditemukan dalam literatur serta menjelaskan dan menginterpretasikan data secara kritis. Analisis ini melibatkan identifikasi pola, perbandingan, dan hubungan antar-konsep yang relevan dengan topik, sehingga mampu memberikan wawasan yang mendalam terhadap permasalahan penelitian.

Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan yang dirumuskan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian serta

memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman isu yang diteliti. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, validitas dan reliabilitas data tetap dijaga melalui seleksi ketat terhadap sumber yang digunakan. Hanya sumber dengan kredibilitas yang dijadikan referensi utama. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif serta memperkaya kajian literatur yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, demografis, dan implementasi. Studi tentang kebijakan kesejahteraan sosial di Iran mengungkapkan bahwa tantangan utama mencakup oposisi politik, konflik, dan kurangnya penggunaan teknologi modern serta panduan eksekutif yang memadai (Aghaei et al., 2023). Sementara itu, penelitian di Korea Selatan menyoroti pengaruh faktor demografis, seperti rasio populasi lanjut usia, pada pengeluaran kesejahteraan, serta pentingnya strategi peningkatan pendapatan daerah untuk memastikan manajemen anggaran yang stabil (Jeju et al., 2024). Di Nigeria, hambatan utama kebijakan kesejahteraan adalah kurangnya partisipasi komunitas dalam desain program dan korupsi, yang mengurangi efektivitas pengurangan kemiskinan (Nkpooyen et al., 2019). Di Indonesia, implementasi program berbasis komunitas seperti di Magelang menghadapi kendala internal seperti alokasi anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga memiliki potensi besar melalui kolaborasi dan dukungan budaya lokal (PrawiraW et al., 2021).

Dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia

menunjukkan kekuatan dalam regulasi dan dukungan budaya, tetapi kelemahannya terletak pada pelaksanaan yang kurang terarah dan pengelolaan anggaran yang tidak optimal. Berbeda dengan Korea Selatan yang mengandalkan strategi peningkatan kemandirian finansial daerah, Indonesia dapat memperbaiki efektivitas dengan pendekatan berbasis komunitas dan evaluasi program yang berkelanjutan. Tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan data yang akurat, menjadi pengingat pentingnya kebijakan yang fleksibel dan inklusif untuk mendukung kesejahteraan sosial jangka panjang.

Berdasarkan analisis literatur, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu faktor kunci adalah kejelasan kebijakan dan regulasi, yang memastikan bahwa program kesejahteraan sosial dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Regulasi yang jelas dan terstruktur akan mengurangi potensi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang diharapkan. Selain itu, sumber daya finansial yang memadai menjadi faktor penentu dalam menentukan cakupan serta kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran yang sering dihadapi dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan, dengan membatasi akses kepada kelompok yang membutuhkan.

Faktor lain yang sangat penting adalah sumber daya manusia, yang mencakup kapasitas dan kompetensi pelaksana kebijakan, termasuk tenaga kerja sosial. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja sosial dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat juga memainkan peran signifikan dalam menentukan

keberhasilan kebijakan kesejahteraan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program tersebut dapat menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan keberlanjutan program.

Selain itu, infrastruktur dan teknologi sangat menentukan aksesibilitas layanan sosial. Infrastruktur fisik yang memadai serta pemanfaatan teknologi dalam distribusi bantuan dapat mempercepat proses pemberian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Monitoring dan evaluasi menjadi elemen vital yang memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Sistem pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan sumber daya serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Konteks sosial-budaya juga tidak dapat diabaikan, mengingat kebijakan yang sesuai dengan nilai dan struktur sosial masyarakat akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Keberhasilan kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia terlihat dalam berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan, yang menunjukkan upaya nyata dari pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat. Program-program ini, bersama dengan pengakuan terhadap kelompok rentan, seperti lansia, difabel, dan anak-anak, menjadi kekuatan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meningkatnya penggunaan teknologi, seperti aplikasi digital dan transfer tunai langsung, juga menjadi langkah maju dalam modernisasi distribusi bantuan sosial.

Namun, terdapat pula beberapa kelemahan kebijakan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah tumpang tindih program yang terjadi akibat kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Keterbatasan anggaran juga tetap menjadi kendala yang signifikan, sehingga program-program kesejahteraan sosial tidak dapat

menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pemerataan layanan di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar, diikuti dengan kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang optimal. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam memperoleh data akurat terkait dampak program terhadap masyarakat.

Dalam perbandingan internasional, negara-negara seperti Swedia dan Norwegia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang lebih terstruktur dengan universal coverage dan didukung oleh anggaran besar serta sistem pajak progresif. Sementara itu, Brasil melalui program Bolsa Família telah menunjukkan kesuksesan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui bantuan langsung bersyarat. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dengan memperbaiki koordinasi antarinstansi, meningkatkan sistem pendataan, serta mengalokasikan anggaran secara lebih efektif.

Berdasarkan temuan dan analisis, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertama, dibutuhkan pembangunan sistem data yang terintegrasi yang memudahkan monitoring dan evaluasi program secara lebih efektif. Hal ini akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang sejauh mana kebijakan berdampak pada masyarakat serta memungkinkan perbaikan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Kedua, peningkatan anggaran untuk program-program kesejahteraan sosial melalui reformasi fiskal menjadi langkah penting untuk memastikan cakupan program yang lebih luas. Dengan anggaran yang memadai, lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

Ketiga, kolaborasi multistakeholder perlu didorong, dengan melibatkan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas.

Keempat, kebijakan kesejahteraan sosial harus berbasis bukti dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya lokal, agar

KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Kebijakan kesejahteraan sosial yang efektif dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Temuan dari studi literatur menunjukkan bahwa kejelasan kebijakan, sumber daya finansial yang memadai, kapasitas pelaksana kebijakan, partisipasi masyarakat, serta infrastruktur dan teknologi yang baik merupakan faktor-faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan di Indonesia, seperti program PKH dan BPJS Kesehatan, tantangan masih tetap ada, seperti tumpang tindih program, keterbatasan anggaran, dan pemerataan layanan yang belum optimal, terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang lebih mapan, seperti Swedia, Norwegia, dan Brasil, untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi, meningkatkan sistem pendataan, dan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien.

Pentingnya langkah-langkah strategis seperti pembangunan sistem data

lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan struktur sosial masyarakat akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia diharapkan dapat lebih optimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.

terintegrasi, peningkatan anggaran, kolaborasi multistakeholder, dan kebijakan yang berbasis bukti serta disesuaikan dengan konteks sosial-budaya lokal menjadi kunci dalam memperbaiki kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan, menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67-79.

Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(3), 193-205.

Huraerah, A. (2019). *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi*

Dynamic Governance . Bandung: Nuansa Cendekia.

Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74-82.

Purwantini, A. H., Aziza, D. A., Kurniawan, A. B., Azizah, F. N., Utami, W. I., & Anggitasari, F. (2021). Optimalisasi peran perpustakaan desa donorojo berbasis inklusi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Community Empowerment*, 6(3), 480-485.

Putri, R. F. W., Hariani, M., Safira, M. E., & Vitrianingsih, Y. (2024). Pemberian pakaian gratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologis di masyarakat. *Economic Xenization Abdi Masyarakat*, 2(1), 45-50.

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.

Tamimah, N. (2021). *Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer*. Jurnal Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 01 (02).

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.

Yasir, A. (2009). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya ke I, II, III & IV*. Surabaya: Permata Press.

Zou, H. (2024). The social welfare effect of environmental regulation: An analysis based on Atkinson social welfare function. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140022.